

ORTODOKSI VS HETERODOKSI

Zindiq Al-Walīd bin Yazīd dalam Perspektif Civil Society di Masa Dinasti Bani Umayyah

Raabiul Akbar

SEKOLAH PASCASARJANA UIN Syarif Hidayatullah

Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Cirendeu, Ciputat, Indonesia

*Ciputat 15419: rabiulakbar68@gmail.com

Abstrak : Khalifah memperlakukan zindiq dengan cara yang berbeda pada dua masa yang berbeda. Pada masa Dinasti Bani Umayyah, zindiq lebih sedikit dan tidak menarik perhatian besar dari khalifah selama mereka tidak mengganggu kekuasaannya. Tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa kasus zindiq sebenarnya bukan masalah agama, melainkan kontestasi politik dengan latar agama yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan kitab *Tārkh al-Ṭabarī Tārkh al-Rusul wa al-Mulūk* karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī sebagai data primer. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami konteks historis terkait dengan konsep ortodoksi dan heterodoksi. Penulis membatasi penelitian pada Dinasti Bani Umayyah. Berdasarkan literatur klasik dan konsep ortodoksi dan heterodoksi, tulisan ini membuktikan adanya pergeseran konteks politik dalam kasus zindiq.

Kata-Kata Kunci : Ortodoksi, Heterodoksi, Zindiq, Bani Umayyah, Abbasiyah

Abstract : The Caliph treated zindiq in different ways at two different times. During the Umayyad dynasty, zindiq were fewer and did not attract much attention from the caliph as long as they did not interfere with his rule. This article aims to prove that the zindiq case is not actually a religious issue, but rather a political contestation with a strong religious background. This research uses a qualitative approach using the book *Tārkh al-Ṭabarī Tārkh al-Rusul wa al-Mulūk* by Ibn Jarīr al-Ṭabarī as primary data. A qualitative approach was chosen to understand the historical context related to the concepts of orthodoxy and heterodoxy. The author limits his research to the Umayyad Dynasty. Based on classical literature and the concepts of orthodoxy and heterodoxy, this article proves a shift in the political context in the zindiq case.

Key Words : Orthodoxy, Heterodoxy, Zindiq, Umayyads, Abbasids

PENDAHULUAN

Meskipun belum ada literatur yang secara eksplisit membahas tentang konsep ortodoksi vs heterodoksi dalam konteks zindiq, terdapat beberapa karya yang secara tersirat mengangkat isu-isu terkait. Bello (Maria Isabel Fierro Bello, 1988) menganalisis tuduhan zandaqa yang terjadi di Andalusia di bawah Bani Umayyah dari tahun 138/755 hingga tahun 422/1031. Dia meneliti enam orang yang dituduh zandaqa selama periode Umayyah tersebut dan tidak menemukan bukti adanya kasus Manicheisme tersembunyi (Case of hidden Manicheism) di antara mereka. Dalam dua kasus pertama, individu yang dituduh zandaqa memiliki pandangan mu'tazilah, yang menyebabkan tuduhan zandaqa terhadap mereka. Namun, nyawa mereka tidak terancam dalam kasus ini. Dalam dua kasus selanjutnya, tuduhan

zandaqa berujung pada eksekusi mati karena dicurigai terlibat dalam konspirasi melawan penguasa saat itu. Sementara dua tuduhan zandaqa yang tersisa dibawa ke pengadilan, tetapi tidak berakhir dengan hukuman mati. Taha (Taha Jabir Alalwani, 2011), yang juga tertarik dengan fenomena tuduhan murtad, kafir, dan penyimpangan agama terhadap individu, menyajikan daftar 17 nama cendekiawan Muslim yang dituduh murtad. Dia mengamati bahwa banyak dari para sarjana, mistikus, dan ahli hukum ini mengalami penganiayaan, pengasingan, dan tuduhan murtad, ateisme, serta penyimpangan agama. Taha mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya di balik penderitaan mereka terletak pada fakta bahwa mereka telah melanggar kebijakan penguasa atau telah mengadopsi pandangan dan ajaran yang berbeda dengan yang diinginkan oleh mereka yang berkuasa dan oleh kalangan sarjana yang memiliki reputasi buruk. Namun, Taha menekankan bahwa jika seseorang tetap teguh pada Al-Qur'an dan menolak untuk menyimpang dari apa yang dinyatakan di dalamnya, individu tersebut akan memperkuat komunitas Muslim dan agama yang mereka anut, serta mencegah mereka dari penderitaan nasib yang menyakitkan yang terus mereka hadapi.

Selanjutnya, El Fegiery dan koleganya (Elie Abouaoun, Harith Hasan Al-Qarawee, Moataz El Fegiery, Mohammad Fadel, Omar Iharchane, Driss Maghraoui, Imad Salamey and Asma T. Uddin, 2017) melakukan pembahasan tentang penggunaan hukum dalam membatasi perdebatan agama, reformasi hukum Islam dan negara, serta pemikiran kritis keagamaan di negara-negara Arab. Mereka berpendapat bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan kebebasan berekspresi harus menjadi prioritas dalam mengembangkan wacana yang toleran dan inklusif. Hal ini dilakukan dalam upaya berkelanjutan untuk menghadapi ekstrimisme Islam.

Ibrahim (Mahmood Ibrahim, 1994) juga melakukan analisis yang menyatakan bahwa inkuisisi, jauh dari motif agama atau etnis, sebenarnya dilakukan dengan tujuan politik. Menurutnya, inkuisisi ini merupakan tahap awal dalam kekuasaan aristokrasi dan elit penguasa trans Islam. Dalam perspektif ini, serangan terhadap Zanadiq memberikan petunjuk yang lebih jelas dalam menjelaskan interaksi antara teologi dan politik. Hal ini juga membantu mengidentifikasi kekuatan sosial yang saling bersaing untuk mendefinisikan negara dan, akibatnya, mempengaruhi arah perkembangan teologis.

Berbicara tentang kasus heterodoksi zindik yang terjadi pada masa dinasti bani Umayyah. Lagi-lagi kasus zindik sebenarnya bukanlah persoalan agama, akan tetapi merupakan kontestasi politik yang dibungkus dalam nuansa agama yang sangat kental.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah literature research dengan fokus pada mengkaji kitab *Tārkh al-Ṭabarī Tārkh al-Rusul wa al-Mulūk* karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī sebagai data primer pada periode dinasti Bani Umayyah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari buku kontemporer berjudul *Ḍuḥā Al-Islām* dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya.

Untuk pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Literature Review*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber teori, jurnal, buku, dan

artikel sebelumnya yang relevan dengan topik mengenai ortodoksi vs heterodoksi serta fenomena zindiq pada periode dinasti Bani Umayyah. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen seperti jurnal, buku, laporan, atau catatan sejarah yang terkait dengan pertanyaan penelitian tentang konsep ortodoksi vs heterodoksi pada periode tersebut.

Prosedur pengumpulan data melibatkan tahapan sebagai berikut: menentukan sumber dokumen yang relevan dengan penelitian, membaca dan mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang relevan dengan topik ortodoksi vs heterodoksi pada periode dinasti Bani Umayyah, membuat catatan atau kutipan penting dari dokumen yang relevan, menganalisis dan menginterpretasi data dari dokumen untuk mendukung argumen penelitian, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk teks yang sesuai.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis berbasis teori. Data akan diinterpretasi dan dianalisis dengan merujuk pada kerangka teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Zindiq

Kata zindiq menurut bahasa memunculkan kata tazandaqa yang berarti menjadi seorang ateis atau freethinker (pemikir bebas). Kemudian kata zandaqah yang berarti sebagai seorang ateis. Kata zindiq dan zanādiqah memfokuskan pada makna seseorang yang tidak mempercayai atau disebut sebagai faham ateisme dan golongan freethinker (Milton, 1960: 383).

Secara terminologis, istilah "zindiq" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki loyalitas. Beberapa pendapat menyatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa Persia "zan-din," sementara yang lain mengaitkannya dengan "zand" atau "zend," yang berarti penjelasan kitab dari agama Zardusht atau Zoroaster.

Muhammad Sabit al-Fandi menyatakan bahwa zindiq adalah istilah yang dibawa ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata zind yang artinya sama dengan tafsir atau takwil. Oleh karena itu, zindiq di sini berarti penafsiran atau takwil yang melampaui batas-batas kewajaran, yaitu takwil yang tidak dapat diterima menurut prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan hadis (Ridwan, 1999: 239).

Ibnu Hanbal berbeda pendapat mengenai istilah zindiq. Ia mendefinisikannya sama dengan istilah bid'ah (yaitu mengada-ada) atau istilah ilhad (ateis). Pada saat yang sama, ia juga menolak penafsiran kaum zindiq karena sering memparafrasekan ayat-ayat Alquran dengan definisi yang merusak ajaran Islam (Ridwan, 1999: 239).

Pemahaman yang berbeda juga dapat dilihat melalui kesaksian seorang sejarawan dari Kairo (Mesir) yang menyatakan bahwa istilah zindiq pada awalnya ditujukan kepada para pengikut sekte Mazdak yang melakukan penafsiran baru terhadap kitab suci Avesta (Zendavesta atau kitab Zend), yaitu dengan

memperbanyak isi kitab suci yang sangat bertentangan dengan makna sebenarnya (Al-Gazali, 1952: 239).

Setelah mengumpulkan berbagai buku dan artikel yang membahas tentang kata "zindiq," penulis melakukan penelitian dan menemukan bahwa kata tersebut tidak berasal dari bahasa Arab. Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan, penulis merumuskan bahwa istilah "zindiq" memiliki beberapa konteks utama, yaitu:

1. Konteks aqidah: Istilah "zindiq" digunakan untuk menggambarkan individu yang tidak meyakini akhirat dan konsep rububiyah dan keesaan Allah Swt.
2. Konteks tasawwuf: Dalam konteks tasawwuf, istilah ini digunakan untuk menyebut mereka yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara keliru, menghasilkan tafsir yang menyimpang dan ekstrim. Istilah ini sering kali diterapkan pada para sufi yang telah tersesat atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.
3. Keyakinan sekte Mazdakiyah: Dalam konteks ini, istilah "zindiq" terkait dengan keyakinan pengikut Mazdak atau Mazdakiyyah, suatu aliran dari Persia, yang menafsirkan isi kitab Avesta secara sesat.
4. Konteks bahasa: Selain itu, makna "zindiq" berasal dari bahasa Persia dan mengacu pada penafsiran khusus kitab Avesta dalam aliran Zoroastrianisme dengan menggunakan kata-kata seperti "zan-din," "zand," atau "zend," serta "zind."

Definisi Ortodoksi dan Heterodoksi

Sebelum masuk lebih dalam ke jantung permasalahan tentang ortodoksi vs heterodoksi yang menjadi focus pada makalah ini, pemakalah ingin mengemukakan sedikit pemaparan berkaitan tentang definisi ortodoksi dan heterodoksi baik menurut bahasa maupun istilah. Ortodoksi berasal dari bahasa Yunani orth yang berarti benar dan doxa yang berarti ajaran. Jadi ortodoksi berarti ajaran yang benar. Sedangkan heterodoksi berasal dari kata hetero yang berarti mirip dan doxa yang berarti ajaran. Jadi heterodoksi berarti ajaran yang mirip namun tidak benar (Reese, 1996: 540). Maka secara etimologi ortodoksi berarti ajaran yang benar dan heterodoksi berarti ajaran yang seperti benar padahal tidak (Darmawan, 2012: 180).

Secara terminologis ortodoksi berarti ketaatan kepada ajaran resmi, sedangkan heterodoksi berarti penyimpangan dari ajaran resmi. Walaupun keduanya muncul dari tradisi Kristen, namun esensinya ada dalam seluruh agama (Mc. Donough, 1993: 129). Menurut Arkoun, ortodoksi adalah ajaran yang menjadi kesadaran kelompok mayoritas yang dengannya kelompok itu melihat berbagai kesadaran lain yang dikembangkan oleh kelompok minoritas sebagai heterodoksi (Arkoun, 1994: 264). Secara singkat dan agar lebih mudah dipahami, ortodoksi berarti ajaran yang benar atau ajaran yang resmi. Sedangkan heterodoksi berarti ajaran yang tidak benar atau ajaran yang menyimpang.

Persoalan Ortodoksi Vs Heterodoksi Zindiq

Adapun kaitannya dengan persoalan zindiq, pembahasan tentang definisi zindiq pada pembahasan sebelumnya sangat terkait dengan agama, baik agama Islam maupun agama lain seperti agama leluhur Persia dan kepercayaan lainnya. Secara ringkas, zindiq dapat dikelompokkan ke dalam beberapa konteks, yaitu konteks aqidah, tasawwuf, keyakinan sekte Mazdakiah, dan konteks bahasa. Semua konteks ini pada dasarnya berkaitan dengan topik-topik yang terkait dengan agama. Begitu juga perdebatan antara ortodoksi dan heterodoksi memiliki hubungan erat dengan agama, dan banyak penulis yang membahasnya terkait dengan persoalan agama. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya perdebatan konsep ortodoksi vs heterodoksi tidak selalu berkaitan dengan masalah agama secara tegas. Lebih tepatnya, perdebatan ini berkaitan dengan kontestasi politik yang sering diolah dengan nuansa agama yang sangat kuat. Dari beberapa jurnal, tulisan tentang ortodoksi lebih dominan terjebak pada persoalan agama.

Robert dan Simon menganalisis cara ortodoksi dan heterodoksi berinteraksi ketika menghadapi perbedaan pandangan dalam wacana Muslim dan studi Islam. Dia menganalisis dinamika yang terjadi dalam konteks ini. Kesimpulannya, Robert menyajikan hasil analisisnya mengenai bagaimana kedua perspektif tersebut berinteraksi dan beradaptasi dalam menghadapi divergensi dalam diskusi terkait Islam dan studi Muslim (Langer and Simon, 2008).

Paula juga membicarakan mengenai perbedaan dalam praktik keagamaan Uyghur, baik dalam bentuk ortodoksi maupun heterodoksi. Dia mengulas tentang istilah ilmiah "ortodoksi" dan "heterodoksi" serta nilai-nilai penelitian yang terkait. Islam yang ada di kalangan orang Uyghur di Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok, dan juga di antara umat Muslim lainnya di Asia Tengah sering kali dibahas sebagai bentuk Islam yang berbeda dari yang dianggap "asli", "murni", atau "resmi", atau bahkan sebagai sistem keagamaan yang terpisah dengan identitasnya sendiri (Schorde, 2008).

Selain itu, John juga menulis tentang pendekatan terhadap munculnya heterodoksi dalam islam abad pertengahan. Dia membahas tentang peran integral heterodoksi dalam sejarah islam dan bagian komponen heterodoksi serta kontribusi heterodoksi terhadap ortodoksia (Taylor John, 1967).

Denis yang lebih memfokuskan pada pembahasan Syiah membahas tentang syi'isme abad kesembilan belas pada kasus syekhisme dan babisme (Denis MacEoin, 1990). Kebanyakan jurnal yang membahas tentang ortodoksi lebih dominan dikaitkan dengan topik-topik keagamaan.

Ortodoksi vs Heterodoksi Zindiq dalam Perspektif Masyarakat Sipil pada Periode Dinasti Bani Umayyah

Istilah ortodoksi dan heterodoksi memang digunakan pertama kali dalam agama Kristen. Istilah ini sudah digunakan pada masa para Bapa Gereja mula-mula pada abad ke-2 dan ke-3 M, ketika mereka bergulat dengan berbagai perselisihan teologis dan ajaran sesat. (William G. T. Shedd, D.D, 1893). Pada masa dinasti bani Umayyah memang tidak digunakan istilah heterodoksi untuk menggambarkan sekte atau individu yang sesat atau menyimpang, namun istilah zindiq ini dapat

menggambarkan keadaan seseorang yang menyimpang dari ajaran syariat. Ibnu Hanbal berpendapat bahwa istilah "zindiq" dapat dianggap setara dengan *bid'ah* (tindakan mengada-ada) atau *ilhad* (ateisme). Selain itu, ia menolak penafsiran yang dilakukan oleh kelompok zindiq karena seringkali mereka mengubah kata-kata dalam ayat-ayat Alquran dengan definisi yang dapat merusak ajaran Islam. (Ridwan, 1999: 239). Maka zindiq juga dapat didefinisikan sebagai heterodoks dari ajaran yang ortodoks di masa itu.

Jumlah zindiq pada masa dinasti bani Umayyah tidak sebanyak pada masa dinasti bani Abbasiyah. Pada masa dinasti bani Umayyah terdapat beberapa individu yang dituduh sebagai zindiq, termasuk Abd al-Şamad bin 'Abd al-A'lā, yang merupakan *muaddib* (ahli sastra) dari Al-Walīd bin Yazīd bin 'Abd al-Malik. Selain itu, Al-Walīd bin Yazīd bin 'Abd al-Malik sendiri, juga dituduh sebagai zindiq pada waktu itu (Ahmad Amin, 2012: 136).

Di masa dinasti bani Abbasiyah, terdapat banyak individu yang dituduh sebagai zindiq. Di antara mereka adalah : Hammād 'Ajrād, Muhammad bin 'Īsā, Bassyār, 'Umar al-Kalwāzī, Ibnu Abī al-'Awjā', Yahyā bin Ziyād, Yazdān bin Bāzin Kātib Yaqtīn, Ali bin Yaqtīn dari Ahl Nahrawān, Yūnus bin Farwah, Yazīd Ibn al-Fayḍ, Al-Afsyīn, Anggota al-Afsyīn: Muhammad bin Abd al-Malik al-Ziyāt, Ahmad bin Abī dāud, Bābak al-Khurmī, Ibrāhīm bin Siyābah, Adam (hafīd Umar bin Abd al-'Aziz), Abd al-Karim bin Abi al-'Awja', Şālih bin 'Abd al-Quddūs, 'Ayyūb al-Islām, Hammādūn al-Şalāsah : Hammād Ajrād, Hammād al-Rāwiyah, Hammād Ibn Zabarqān, Bassyār bin Bard, Ibn al-Muqaffa', Muthi' bin Iyās, 'Alī bin al-Khalīl, Ibn Munzir, Al-Husain bin 'Abdillāh bin 'Ābidīn lillāh Ibn al-'Abbas bin 'Abd al-Muthalib, 'Abdullah Ibn Mu'awiyah Ibn 'Abdillah Ibn Ja'far Ibn Abi Ṭālib, Dāud bin 'Alī, Ya'qūb bin al-Faḍl bin 'Abd al-Rahmān bin 'Abbās bin Rābi'ah bin al-Hāriş bin 'Abd al-Muṭṭalib, Bazr Jamhār, Adsyīr, 'Abd al-Hamīd (Ahmad Amin, 2012). Beberapa di antara mereka bahkan dieksekusi mati oleh khalifah sebagai hukuman langsung.

Namun, jika diperiksa lebih teliti dan dielaborasi secara seksama tentang apa yang terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah terhadap orang-orang yang dituduh zindiq, akan muncul pertanyaan besar. Mengapa mereka yang jelas-jelas terbukti melakukan kezindikan dibiarkan tanpa tindakan apapun? Bahkan yang lebih mengherankan, seperti yang terjadi pada Al-Walīd bin Yazīd, seorang zindiq yang dibiarkan berperilaku sesukanya sampai akhirnya menduduki jabatan tertinggi sebagai khalifah Bani Umayyah. Hal yang sama juga terjadi pada orang dekatnya, yakni Abd al-Şamad bin 'Abd al-A'lā, seorang *muaddib* (ahli sastra), yang sebelumnya dipenjara. Namun, setelah khalifah ditaklukkan oleh Al-Walīd bin Yazīd yang memiliki hubungan dekat dengannya, Abd al-Şamad bin 'Abd al-A'lā segera dibebaskan.

Muş'ab al-Zubairī, putra dari ayahnya, mengisahkan bahwa suatu ketika ia berada bersama al-Mahdī, dan dalam percakapan itu, al-Mahdī menyebut nama Al-Walīd bin Yazīd. Kemudian, seseorang mengatakan bahwa Al-Walīd bin Yazīd adalah seorang zindiq (al-Żahabī, 2006: 105). Pada masa dinasti Abbasiyah, istilah "zindiq" digunakan untuk menggambarkan tindakan-tindakan yang melanggar norma, perilaku yang tidak pantas, kebebasan berkelakuan yang berlebihan, dan kecenderungan untuk mengonsumsi minuman keras (Ahmad Amin, 2012: 137).

Mengacu pada definisi tersebut, maka dapat diterapkan pada periode lain selain masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Seharusnya, dalam agama Islam, individu yang melakukan perbuatan zindiq memiliki status hukum yang serupa. Menurut pandangan beberapa ulama, jika ditemukan dan diketahui bahwa seseorang adalah kafir zindiq, maka ia diperbolehkan dibunuh dengan alasan *hadd* (hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam). (Jābir al-Jazāirī, 1984). Istilah zindiq pada masa ini didefinisikan sebagai heterodoks yang menyimpang dari ajaran syariat.

Apabila isu zindiq dianggap sebagai isu agama, maka seharusnya semua orang yang dituduh sebagai zindiq pada masanya harus diperlakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam. Jika ada satu individu zindiq yang dieksekusi mati, maka zindiq lainnya juga seharusnya mendapatkan perlakuan serupa berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat agama Islam. Namun, kenyataannya terdapat beberapa individu yang dituduh sebagai zindiq, kemudian dieksekusi mati, sementara yang lain tidak dieksekusi dan bahkan dibiarkan begitu saja tanpa penahanan atau eksekusi oleh khalifah.

Dalam kasus tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian perlakuan terhadap individu yang dituduh sebagai zindiq. Dalam konteks agama, seharusnya semua individu yang dituduh sebagai zindiq harus diperlakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam syariat agama Islam. Jika ada individu yang dieksekusi mati sebagai akibat tuduhan zindiq, maka prinsip agama Islam menuntut bahwa individu yang terindikasi zindiq lainnya juga seharusnya mendapatkan perlakuan serupa.

Namun, kenyataannya, terdapat perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus zindiq. Beberapa individu yang dituduh sebagai zindiq dieksekusi mati, sementara ada yang tidak mengalami tindakan tersebut dan bahkan tidak mendapatkan penahanan atau eksekusi dari khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor non-agama seperti politik, hubungan keluarga, atau perebutan kekuasaan mempengaruhi penanganan kasus zindiq. Pendapat ini selaras dengan argument John Stuart Mill walaupun tidak secara eksplisit mendefinisikannya dalam istilah-istilah tersebut. Terkait faktor politik, Mill mengungkapkan potensi bahaya dari birokrasi yang kuat. Jika seluruh kekuasaan dan pengambilan keputusan terkonsentrasi pada elit birokrasi, hal ini dapat mengarah pada sistem yang berpihak pada penguasa dan berakibat pada perlakuan tidak adil terhadap pihak di luar kelompok tersebut (Mill, 2001, p. 102). Penanganan yang tidak konsisten terhadap individu yang dituduh sebagai zindiq menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, politik, dan kekuasaan memainkan peran penting dalam menentukan perlakuan terhadap mereka.

Al-Ṭabarī mengisahkan tentang periode pemerintahan Al-Walīd bin Yazīd bin ‘Abd al-Malik yang dituduh sebagai zindiq pada periode dinasti bani Umayyah (al-Ṭabarī, 1970). Untuk membantu pembaca memahami hubungan kekerabatan antara tokoh-tokoh yang akan dijelaskan nanti, berikut disajikan sebuah bagan.

Dalam sub-bagian yang membahas tentang kekhilafahan Al-Walīd bin Yazīd bin ‘Abd al-Malik bin Marwān dalam kitab *tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, disebutkan bahwa ayahnya, Yazīd bin ‘Abd al-Malik bin Marwān, telah membuat perjanjian bahwa Al-Walīd bin Yazīd bin ‘Abd al-Malik akan menjadi khalifah setelah

saudaranya Hisyām bin Abd al-Malik. Hal ini dikarenakan pada saat itu, Al-Walīd masih sangat muda, sekitar berusia sebelas tahun. Yazīd bin ‘Abd al-Malik bin Marwān tidak meninggal dunia sampai Al-Walīd berusia lima belas tahun, sehingga timbul penyesalan dalam dirinya terkait perjanjian tersebut. Yazīd bin ‘Abd al-Malik bin Marwān wafat ketika Al-Walīd berusia lima belas tahun. Secara otomatis, Hisyām bin Abd al-Malik yang memiliki hubungan erat dengannya, menjadi khalifah setelahnya. Pada saat itu, hubungan antara Al-Walīd dan Hisyām masih sangat baik dan saling menghormati satu sama lain. Namun, terjadi perubahan dalam perilaku Al-Walīd yang mulai menyimpang dengan perilaku bebas dan konsumsi minuman memabukkan. Pengaruh yang mempengaruhinya dalam penyimpangan tersebut adalah Abd al-Ṣamad bin ‘Abd al-A’lā, muaddib (seorang ahli sastra) yang merupakan orang kepercayaan Al-Walīd sendiri. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ahmad bin Zuhair, dari ‘Ali bin Muhammad, dari Juwairiyyah bin Asma’, Ishaq bin Ayyub, ‘Amir bin al-Aswad dan lain-lain dalam kitab al-Ṭabarī, 4:222. (al-Ṭabarī, 1970: 222).

Kemudian, Hisyām menginginkan untuk memutuskan hubungan dengan Al-Walīd dan Abd al-Ṣamad. Pada tahun 119 H, Hisyām mengutus Al-Walīd untuk menunaikan ibadah haji dan membawa sejumlah anjing yang disimpan dalam beberapa kotak. Salah satu kotak yang berisi anjing jatuh dari unta, dan Al-Walīd melepaskan anjing tersebut untuk berlari-lari dengan menyerangnya. Dia juga membawa sebuah kubah yang berukuran hampir sama dengan Ka'bah yang akan ditempatkan di atas Ka'bah, serta membawa minuman keras (*khamar*). Dia duduk di dalam kubah tersebut dan mengintimidasi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang berkata, "Kami tidak mempercayai orang-orang yang bersamamu, dan kami berada di pihakmu." Namun, Al-Walīd tidak mengindahkan ucapan mereka, dan tampak jelas bagi orang-orang bahwa dia tidak menghormati agama. Kemudian, Al-Walīd melaporkan kejadian tersebut kepada Hisyām dan berkomitmen untuk menggulingkannya, serta bersumpah setia kepada anak Hisyām, yaitu Maslamah bin Hisyam. Namun, Hisyām tidak menyetujui dan berkata, "Jadikanlah dia (Maslamah) menjadi khalifah setelahmu." Hisyām kemudian mengingkari janjinya, memberikan mudharat (bahaya) kepada Al-Walīd, dan merahasiakan niatnya untuk mengangkat anaknya sebagai penggantinya. Kaumnya menjawab permintaan tersebut. Di antara mereka yang menyetujui adalah kedua pamannya, yaitu Muhammad dan Ibrahim, yang keduanya merupakan anak Hisyām bin Ismail al-Makhzūmī, dari keluarga bani Qa'qā' bin Khalīd al-'Abbāsī dan anggota keluarga lainnya. (al-Ṭabarī, 1970: 222).

Setelah al-Walid berubah perilaku dan mulai gemar minum alkohol setelah bergaul dengan Abd al-Shamad, Hisyam ingin menghentikan hubungannya dengan al-Walid. Al-Walid juga semakin cemburu dan tidak menyukai kehadiran sepupunya tersebut, serta lebih memilih jika anaknya, yaitu Maslamah, menjadi khalifah daripada dirinya sendiri (Hisyam). Melihat perilaku al-Walid yang semakin buruk, Hisyam melihat peluang untuk menggantikannya dengan anaknya, Maslamah, secara diam-diam. Namun, alih-alih menghukum al-Walid secara tegas karena melanggar hukum Islam dengan jelas, Hisyam memanfaatkan kezindikan al-Walid dengan mengambil inisiatif untuk mewariskan kekhalifahan kepada anaknya. Apakah Hisyam takut untuk menghukum al-Walid karena mereka berada dalam

satu keluarga khalifah? Atau mungkin Hisyam ingin mendapatkan simpati dari orang-orang dengan membuat mereka semakin membenci al-Walid, sehingga anaknya lebih dianggap pantas untuk mewarisi kekhalifahan setelahnya?

Al-Walid terus melanjutkan kebiasaannya dalam minum-minuman dan terus mencari kesenangan. Mendengar hal itu, Hisyam mengatakan kepadanya, "Betapa celaknya dirimu, wahai al-Walid. Demi Allah, aku tidak tahu apakah engkau masih memegang agama Islam atau tidak. Engkau tidak hanya terlibat dalam perbuatan maksiat, tetapi juga aktif mencarinya tanpa rasa takut dan tanpa berusaha menyembunyikannya." Mendengar perkataan Hisyam, al-Walid meresponsnya dengan menulis sebuah surat:

"Wahai orang yang meragukan agama kami,

Kami mengikuti agama yang juga diikuti oleh Abi Syakir,

Kami minum dengan mencampurnya,

Kadang dengan rasa panas dan kehangatan di dalam cangkir." (al-Ṭabarī, 1970).

Hisyam, yang menjabat sebagai khalifah pada saat itu, mengetahui dengan jelas tentang perilaku saudara sepupunya yang bergaul dengan Abd al-Ṣamad bin 'Abd al-A'lā, bahwa keduanya suka minum-minuman yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai khalifah, seharusnya Hisyam bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum Allah. Dari situ dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai zindiq, yang dianggap sebagai heterodoks/aliran keagamaan yang menyimpang, sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial, dalam agama Islam sebenarnya bukan hanya masalah agama semata, tetapi lebih merupakan kontestasi politik yang dikemas dalam kerangka agama yang sangat kuat.

Hal ini diperkuat John Stuart Mill dalam karyanya "On Liberty". Faktor sosial dan politik sangat menentukan suatu keadilan. Terkait faktor sosial, Mill berargumen bahwa masyarakat sering kali memaksakan preferensinya kepada orang lain, sehingga mengarah pada sistem yang memihak kelompok tertentu dan mendiskriminasi kelompok lain (Mill, 2001, p. 10). Mill juga menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan wacana terbuka dalam masyarakat demokratis. Ia memperingatkan bahayanya menekan perbedaan pendapat, yang dapat mengarah pada bentuk tirani politik dan mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap mereka yang memiliki pandangan minoritas (Mill, 2001, p. 33).

Respons Hisyam sebagai khalifah mencerminkan interaksi kompleks antara agama dan faktor sosial-politik. Perdebatan mengenai zindiq, sebagai aliran keagamaan yang dianggap menyimpang, tidak dapat dipahami hanya dalam konteks keagamaan semata. Dalam konteks sosio-antropologi, agama seringkali menjadi arena di mana dinamika kekuasaan, politik, dan identitas sosial terlibat. Tindakan Hisyam sebagai khalifah yang seharusnya bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan otoritas keagamaan dan kewibawaan politiknya. Dalam hal ini, perdebatan mengenai zindiq bukan hanya berhubungan dengan keyakinan agama, tetapi juga merupakan kontestasi politik yang dilakukan dalam kerangka agama yang kuat. Dengan demikian bahwa perdebatan mengenai zindiq dalam agama Islam melibatkan interaksi kompleks antara faktor agama, sosial, dan politik. Hal ini menunjukkan bagaimana faktor-faktor sosio-politik dapat membentuk dan memengaruhi dinamika agama serta

interpretasi terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Dalam hal ini, pemahaman perdebatan mengenai zindiq perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor-faktor sosial dan politik yang memengaruhinya.

Al-Ṭabarī melanjutkan narasi perseteruan antara Hisyam dan al-Walid yang pada intinya adalah konflik kecemburuan terkait kekuasaan. Setelah al-Walid merespons perkataan Hisyam dengan sebuah surat yang berisi sindiran, Hisyam merasa marah dan mengungkapkan kekesalannya kepada anaknya, Maslamah (juga dikenal sebagai Abī Syākir). Hisyam mengatakan, "al-Walid telah memberiku pinjaman dengan kehadiranmu, dan aku telah mencalonkanmu sebagai khalifah! Tetaplah teguh dalam berperilaku yang baik dan ikuti jamuan bersama."

Kemudian pada tahun 119, pergantian musim terjadi dan Maslamah mulai menunjukkan dedikasinya dalam beribadah, kekuasaan, dan sikap lembutnya. Ia membagikan harta kekayaannya di kota Mekah dan Madinah, sambil memberikan pesan kepada penduduk kota:

"Wahai mereka yang meragukan agama kami,
Kami mengikuti agama yang dianut oleh Abī Syākir,
Dia yang telah memberikan puncak gunung,
Bukanlah seorang pengingkaran atau kafir." Ia menyinggung al-Walid.

Ibunya Maslamah bin Hisyam adalah Ummu Hakīm binti Yahyā bin al-Hakam bin Abī al-Āsh. Al-Kumait berkata:

"Sesungguhnya Khilafah adalah pondasinya..
Setelah al-Walid kepada Ummu Hakīm.."

Khalid bin 'Abdillah al-Qusari mengatakan, "Saya dengan tegas menolak khalifah yang disebut Abi Syakir." Akibatnya, Maslamah bin Hisyam marah kepada Khalid. Ketika Asad bin 'Abdullah, saudara Khalid bin 'Abdullah, meninggal dunia, Abi Syakir menulis puisi yang mengandung sindiran dari Yahya bin Naufal kepada Khalid dan saudaranya, Asad, saat mereka meninggal dunia.

"Apakah Ia pergi dari Khalid dan dibinasakan..
Oleh Tuhannya mengistirahatkan hambanya yang bernama Asad..
Adapun bapaknya dia samar-samar tidak jelas..
Seorang hamba yang pantas untuk menyembah dengan leher terikat"

Lalu syair tersebut dimasukkan ke dalam gulungan dan seseorang diutus untuk mengirimkan surat itu kepada Khalid. Khalid mengira bahwa surat tersebut berisi ungkapan belasungkawa dari saudaranya, dan ia membuka segel suratnya. Namun, yang ia temui hanyalah sindiran yang ditujukan kepadanya. Dengan keheranan, ia berkata, "Tidak pernah aku melihat ungkapan belasungkawa seperti ini sebelumnya!" (al-Ṭabarī, 1970: 223).

Lagi-lagi isu khilafah sebenarnya bukanlah isu agama yang mendasar. Perselisihan yang terjadi di sini tidak berkaitan dengan agama secara langsung, melainkan lebih merupakan perdebatan dan persaingan kekuasaan antara mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan khalifah. Persoalan ini lebih cenderung bersifat ejekan dan saling mengolok satu sama lain.

Teori transformasi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung (Galtung, and D. Fischer, 2013) dapat dijadikan solusi dalam permasalahan ini. tujuan utama transformasi konflik adalah mengubah dinamika konflik menuju penyelesaian yang

lebih konstruktif dan mencapai perdamaian positif. Pendekatan ini melibatkan dialog, mediasi, dan upaya untuk membangun pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam pandangan Habermas, dialog yang rasional dan argumentatif dapat mengatasi perdebatan dan persaingan kekuasaan. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, pihak-pihak yang terlibat dapat saling mendengarkan, memahami argumen masing-masing, dan mencapai kesepakatan yang lebih adil dan berkeadilan. Dialog tersebut juga dapat membantu memisahkan isu-isu ejekan dan saling mengolok agar fokus dapat dialihkan pada substansi permasalahan yang lebih mendasar. Dengan menggabungkan teori Transformasi Konflik Galtung dan teori dialog Habermas, pendekatan yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah dengan mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan khilafah untuk terlibat dalam dialog yang rasional, inklusif, dan argumentatif. Dialog tersebut dapat membantu membangun pemahaman bersama, mengatasi perdebatan yang tidak relevan, dan mencari solusi yang berkeadilan serta berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap konteks konflik memiliki dinamika dan faktor-faktor yang unik, sehingga pendekatan yang tepat dapat bervariasi. Penerapan teori Transformasi Konflik dan teori dialog harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik konflik yang spesifik.

Selanjutnya, al-Tabari melanjutkan cerita tentang hubungan dekat antara al-Walid dan Abd al-Şamad bin 'Abd al-A'lā, yang diduga sebagai orang yang mempengaruhi al-Walid menuju perilaku yang menyimpang. Pada periode pemerintahan Khalifah Hisyam, Abd al-Şamad bin 'Abd al-A'lā ditahan oleh khalifah karena perilaku menyimpangnya. Ahmad Amin, dalam bukunya *Ḍuhā al-Islām*, menyatakan bahwa di masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah, ada beberapa orang yang dituduh sebagai zindik, termasuk Abd al-Şamad bin 'Abd al-A'lā, yang merupakan guru sastra dari Al-Walid bin Yazid bin 'Abd al-Malik (Ahmad Amin, 2012: 136).

Suatu saat, Hisyam melihat al-Walid pergi bersama beberapa orang dekat dan pengikutnya menuju daerah al-Azraq, antara Arḍ Balqayn dan Fazārah, di atas air yang dikenal sebagai al-Agdaf. al-Walid meninggalkan sekretarisnya yang bernama 'Iyāḍ bin Muslim Mawlā 'Abdil Malik bin Marwān di dermaga. Hisyam kemudian berkata kepadanya, "Tuliskan untukku apa yang terjadi sebelum kalian pergi." Aku pergi bersamanya bersama Abd al-Şamad bin 'Abd al-A'lā, mereka minum-minuman, dan al-Walid berkata kepada Abd al-Şamad, "Wahai Abā Wahab, ucapkanlah sebuah syair." Kemudian ia berkata:

"Apakah Anda tidak melihat bintang ketika menyebar ...
itu dimulai pada puncak kekuasaan
Dia bingung dengan maksud galaksi-galaksinya...
telah datang proses tenggelamnya sesuatu dan mencari tempat terbit
Lalu aku berkata, dan menyukai keadaannya ...
dan itu tampak seperti yang terlihat oleh saya, berharap:
Semoga al-Walid semakin dekat kekuasaannya ...
Lalu keduanya menyatu
Dan kami berharap di kerajaannya ...
seperti harapan orang mandul, bahwa mereka akan meninggal dunia

Kami mengadakan ketentuan-ketentuan untuknya...
secara sukarela, maka baginya tempatnya”

Dia mengisahkan syair tersebut, lalu berita itu sampai kepada Hisyam. Setelah itu, Hisyam mengambil keputusan terhadap al-Walid berdasarkan apa yang terjadi, dan ia menulis surat kepada al-Walid: "Aku mendengar kabar bahwa engkau menjadikan Abd al-Şamad sebagai sahabat dekat, teman percakapan, dan teman minum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah aku duga tentangmu, dan aku tidak akan membebaskanmu dari segala kesalahanmu. Oleh karena itu, usirlah Abd al-Şamad dengan cara yang memalukan." Setelah itu, aku (al-Walid) mengusir Abd al-Şamad dan mengungkapkan dalam suratku:

“Mereka memfitnah Aba Wahb dalam hal...
besar, bahkan lebih besar dari pada itu

Maka saya bersaksi bahwa mereka bedusta atasnya...

yaitu kesaksian seorang alim (yang lebih mengenal) yang sangat mengenal mereka”.

Al-Walid menulis surat kepada Hisyam untuk memberitahukan keinginannya bertemu dengan Abd al-Şamad, meminta maaf atas tindakan yang telah sampai kepadanya dari teman minumannya. Dia juga memohon agar Hisyam mengizinkan Ibn Suhail datang menemuinya. Ibn Suhail adalah seorang pemimpin yang pernah berkuasa di Damaskus dan merupakan orang dekat al-Walid. Namun, Hisyam memukul Ibn Suhail dan menjadikannya tawanan, serta menangkap 'Iyāḍ bin Muslim, sekretaris al-Walid, dan menyampaikan pesan bahwa dialah yang menulis berita kepada al-Walid. 'Iyāḍ bin Muslim dianiaya secara kejam dan dimasukkan ke dalam kain penjara. Ketika berita ini sampai kepada al-Walid, dia berkata: "Siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang hanya berpura-pura berbuat baik! Ayahku memberikan bencana kepada keluarganya dan menjadikannya pewaris, dan kemudian dia melakukan apa yang kamu lihat terhadapku. Dia tidak menyadari bahwa aku memiliki ketertarikan terhadap seseorang kecuali dia menggangukannya. Dia menulis surat kepadaku agar mengusir Abd al-Şamad, dan aku telah melakukannya. Dan aku menulis surat kepadanya agar Ibn Suhail datang menemuiku, tapi malah dia memukul dan menawan Ibn Suhail. Dia mengetahui pandanganku tentang hal ini dan dia tahu 'Iyāḍ bin Muslim telah berpisah dariku. Dan engkau merampasnya dariku, melepaskannya dari kedudukannya, dan dia adalah sekretarisku. Lalu, kamu memukulinya dan menjadikannya tawanan. Kamu menyakitiku dengan tindakan ini. Ya Tuhan, jauhkanlah aku darinya."

Kemudian Hisyam bertanya kepada Abu Zubair, yang dipanggil sebagai Nastās: "Apakah orang-orang akan menginginkan al-Walid jika terjadi sesuatu dengan saya?" Abu Zubair menjawab: "Semoga Allah memberikan umur yang panjang kepadamu, wahai amir al-Mu'minin." Hisyam berkata: "Ah, semua orang pasti akan mati. Apakah orang-orang masih mendukung al-Walid?" Abu Zubair menjawab: "Wahai amir al-Mu'minin, dia memiliki janji setia dari orang-orang." Hisyam berkata: "Jika orang-orang masih puas dengan al-Walid, maka saya tidak mengira hadis-hadis yang dikutip oleh orang-orang:

“Pernyataan bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan sebagai khalifah selama tiga hari tidak akan masuk neraka adalah tidak benar” (al-Ṭabarī, 1970: 224).

Setelah khalifah mengetahui bahwa Abd al-Ṣamad keluar minum bersama al-Walid, Abd al-Ṣamad diusir dan ditahan oleh khalifah. Jika masalah zindiq ini merupakan masalah agama, maka tidak akan ada perbedaan perlakuan antara zindiq yang satu dengan yang lainnya.

Dalam konteks tersebut, dapat disimpulkan bahwa khalifah mengambil tindakan terhadap Abd al-Ṣamad setelah mengetahui bahwa ia minum khamar bersama al-Walid. Tindakan tersebut berupa pengusiran dan penahanan terhadap Abd al-Ṣamad. Dari situ, terlihat bahwa khalifah menangani kasus zindiq tidak secara objektif. Karena perbedaan penanganan yang dilakukan terhadap saudaranya yang tentu merupakan cerminan perilaku zindiq namun tidak ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah zindiq tersebut lebih berkaitan dengan persoalan politik dan perebutan kekuasaan daripada hanya masalah agama semata.

Weber menyatakan bahwa kekuasaan dan politik memainkan peran penting dalam membentuk tindakan dan keputusan sosial (Weber, 2009). Penanganan yang tidak objektif terhadap kasus zindiq tersebut mengindikasikan bahwa keputusan dan tindakan khalifah lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan perebutan kekuasaan daripada hanya masalah agama semata. Ini mencerminkan struktur kekuasaan dan dinamika politik yang ada pada saat itu. Dalam teori konflik Weber, konflik sosial muncul karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan dan persaingan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam kasus ini, konflik terjadi antara kelompok yang memiliki hubungan keluarga dengan khalifah, yang kemudian berdampak pada penanganan yang berbeda terhadap individu-individu yang terlibat dalam kasus zindiq.

SIMPULAN

Berdasarkan teori pluralisme dan pendekatan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam karyanya "On Liberty at 150" (John Stuart, 2009), bahwa penanganan Hisyam terhadap perilaku saudara sepupunya menunjukkan ketidakadilan terhadap prinsip-prinsip pluralisme dan kebebasan individu. Dalam pandangan Mill, kebebasan individu adalah hak yang fundamental, kecuali jika tindakan individu tersebut secara langsung membahayakan orang lain. Dalam kasus ini, perilaku saudara sepupunya, meskipun bertentangan dengan ajaran agama, tidak secara langsung membahayakan orang lain. Oleh karena itu, Hisyam seharusnya mengambil pendekatan yang lebih berlandaskan pada prinsip pluralisme, di mana perbedaan dalam keyakinan dan perilaku dapat diterima dalam masyarakat yang demokratis. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai zindiq seharusnya melibatkan dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat. Sebaliknya, Hisyam memilih untuk menggunakan kekuasaannya sebagai khalifah untuk menindak tegas, mengabaikan prinsip pluralisme dan kebebasan individu. Kedua, kasus zindiq sebetulnya tidak terkait dengan aspek keagamaan, melainkan merupakan pertarungan politik yang dilatarbelakangi oleh faktor agama yang kuat.

Pemimpin politik, khususnya khalifah, memperlakukan kelompok zindiq dengan cara yang berbeda pada dua periode berbeda. Pada masa Dinasti Bani Umayyah, jumlah zindiq relatif sedikit dan mereka tidak menarik perhatian besar dari khalifah selama tidak mengancam stabilitas kekuasaannya. Bahkan, seorang zindiq tidak dihukum hanya karena memiliki kedudukan dalam garis keturunan Bani Umayyah. Namun, zindiq lain dikenakan hukuman karena terlibat dalam hubungan dengan pesaing politik dan mengkritik khalifah melalui karya syair.

DAFTAR PUSTAKA

- Amīn, Ahmad. (2012) "Ḍuḥā Al-Islām." In Ḍuḥā Al-Islām. Hindāwī.
- Arkoun, Mohammed. (1994) *Nalar Islami Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan Dan Jalan Baru*. Jakarta: INIS.
- Darmawan, D. (2012) "Ortodoksi Dan Heterodoksi Tafsir." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat*. core.ac.uk, <https://core.ac.uk/download/pdf/292069392.pdf>.
- El Fegiery, Moataz, Ekie Abouaoun, Harith Hasan Al-Qarawee, Mohammad Fadel, Omar Iharchane, Driss Maghraoui, Imad Salamey, and Asma T. Uddin. (2017) "Taking Beliefs to Court Blasphemy, Heresy, and Freedom of Expression under Islamic Law." *Atlantic Council, Islam and Human Rights*. <http://www.jstor.com/stable/resrep03717.5>.
- Galtung, J., D. Fischer, J. Galtung, and D. Fischer. (2013) "Conflict Transformation by Peaceful Means (the Transcend Method)." *Johan Galtung: Pioneer of ...* https://doi.org/10.1007/978-3-642-32481-9_5.
- al-Gazali. (1952) *Al-Munqiz Min al-Ḍalāl*. Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muhammad Ālī Sābikh wa Awlāduhu.
- Ibrahim, Mahmood. (Spring 1994) "Religious Inquisition As Social Policy: The Persecution Of The 'Zanadiqa' In The Early Abbasid Caliphate." *Pluto Journals Vol. 16*. <https://www.jstor.org/stable/41858089>.
- Isabel Fierro Bello, Maria. (1988 1987) "Accusations Of 'Zandaqa' In Al-Andalus." *Istituto per l'Oriente C. A. Nallino Vol. 5/6*. <https://www.jstor.org/stable/25802607>.
- Jabir Alalwani, Taha. (2011) *Apostasy in Islam*. International Institute of Islamic Thought,. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvk8w22r.10>.
- Jābir al-Jazāirī, Abu Bakar. (1984) *Minhāj Al-Muslim*. Kairo: Dār al-Turās.
- Langer, Robert, and Udo Simon. (2008) "The Dynamics of Orthodoxy and Heterodoxy. Dealing with Divergence in Muslim Discourses and Islamic Studies." *Brill Vol. 48*. <https://www.jstor.org/stable/27798270>.
- MacEoin, Denis. (June 1990) "Orthodoxy and Heterodoxy in Nineteenth-Century Shi'ism: The Cases of Shaykhism and Babism." *American Oriental Society Vol. 110*. <https://www.jstor.org/stable/604537>.
- Mc. Donough, Sheilla. (1993) *Orthodoxy and Heterodoxy*. Vol. 2. New York: Simon & Schuster Macmillan.
- Mill, J. S., and P. B. Press. (2009) "On LiBertY at 150." *POLICY*. cis.org.au, <https://www.cis.org.au/wp-content/uploads/2015/04/images/stories/policy-magazine/25-2-09-andrew-norton-2.pdf>.
- Mill, J. S. (2001). *On Liberty*. Batoche Books Limited.
- Milton, J, Wehr, Hans. (1960) *A Dictionary of Modern Written Arabic-English*. London: Macdonald & Evans.
- Reese, Willian L. (1996) *Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought*. New York: Humanity Books.
- Ridwan, H. Kafrawi. (1999) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Van Hoeve.

- Schrode, Paula. (2008) "The Dynamics of Orthodoxy and Heterodoxy in Uyghur Religious Practice." Brill Vol. 48. <https://www.jstor.org/stable/27798274>.
- Ṭabarī, Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-. (1970) *Tārīkh Al-Umam Wa al-Mulūk*. Vol. 4. Kairo.
- Taylor, John. (April 1967) "An Approach to the Emergence of Heterodoxy in Mediaeval Islām." Cambridge University Press Vol. 2. <https://www.jstor.org/stable/20004654>.
- Weber, M. (2009) "The Theory of Social and Economic Organization." books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=G3TYBu6-4G0C&&oi=fnd&pg=PT2&&dq=%22max+weber%22+conflict+theory&ots=XsQmPHpGE2&sig=YF79lUVht0pS3vmn-HpQ6lQqZwc>.
- William G. T. Shedd, D.D. (1893). *Orthodoxy And Heterodoxy*. Charles Scribner's Sons.
- Ḍahabī, Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān. (2006) al-. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Vol. 6. Kairo: Dār al-Hadīš.